



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa dan kondisi Geografis Daerah Kepulauan yang mewilayahi beberapa wilayah Kepulauan, serta dengan mempertimbangkan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kwandang , maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Kwandang ditata dan dimekarkan dengan membentuk Kecamatan baru ;

c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara ;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG. PEMERINTAHAN	<i>Jm</i>
2	KABAG. HUKUM & ORGANISASI	<i>ng</i>
3	Ass II	<i>h</i>
4	Ass I	<i>v</i>
5	SEKDA	<i>h</i>
	WABUP	<i>h/17/02/2010</i>
7	BUPATI	Di Mohon dgn Hormat Untuk Di Tanda-Tangani

*h/17/02-2010*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa, serta dengan mempertimbangkan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kwandang , maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Kwandang ditata dan dimekarkan dengan membentuk Kecamatan baru ;
  - c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara pengaturannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Nomor 4587 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 4503 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Pejabat Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN**  
**PUSAT PEMERINTAHAN**

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kecamatan Ponelo Kepulauan dalam wilayah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Kecamatan Ponelo Kepulauan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kwandang yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Desa Ponelo
- b. Desa Malambe
- c. Desa Otiola
- d. Desa Tihengo

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Ponelo Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Kwandang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Ponelo Kepulauan mempunyai batas-batas wilayah :

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kwandang ;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi ;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kecamatan Kwandang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Ponelo Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang Kecamatan Ponelo Kepulauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Pemerintahan

#### Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ponelo Kepulauan berkedudukan di Desa Ponelo.

BAB III  
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Ponelo Kepulauan, dibentuk Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, diangkat seorang Pelaksana Tugas Camat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pasal 10

Susunan Organisasi Perangkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Ponelo Kepulauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Ponelo Kepulauan ;
  - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Kwandang yang berada didalam Kecamatan Ponelo Kepulauan ;

c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Kwandang Timur.

(2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Kwandang Timur.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Kwandang Timur, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan Kwandang Timur disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

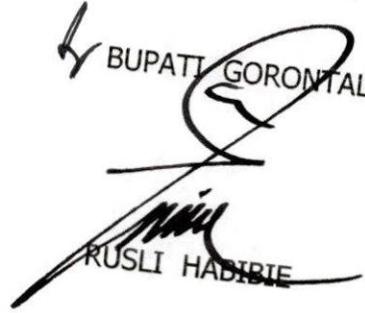
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

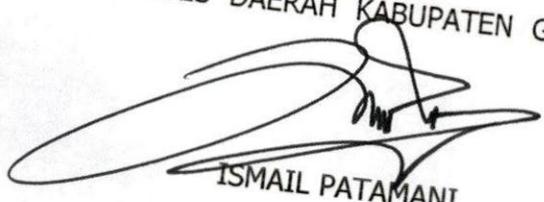
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
RUSLI HADIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Kwandang pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Kwandang pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dari sebagian wilayah Kecamatan Kwandang perlu dibentuk satu Desa lagi yaitu Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemauan / gagasan pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1 : 25.000

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan usul Camat Kwandang dan Camat Ponelo Kepulauan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan.

### Pasal 6

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Ponelo Kepulauan pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu tata ruang wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan Desa Ponelo sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Ponelo Kepulauan adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

### Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

## Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Ponelo Kepulauan serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Kwandang kepada Pemerintah Kecamatan Ponelo Kepulauan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah dengan dibantu secara bersama-sama oleh Pemerintah Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan membuat dan menyusun daftar inventaris.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Pelaksana Tugas Camat. Pelantikan Camat Kecamatan Ponelo Kepulauan didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas